

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP OPINI AUDIT PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : YASKAR M. Y LELUASA

NIM : 126222117

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2023

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP OPINI AUDIT PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : YASKAR M. Y LELUASA

NIM : 126222117

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2023

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP OPINI AUDIT PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN)**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Yaskar M. Y Leluasa

126222117

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Susanto SE., M.M., Ak., CPA, CPMA, CA, ACPA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini audit pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota/kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 yang terdapat di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Variabel independen penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Opini Audit Pemerintah Daerah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini audit pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, berpengaruh positif signifikan terhadap penentuan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan oleh BPK.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Opini Audit Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of the internal control system (SPI), and compliance with laws and regulations on local government audit opinion. The sample in this study is the BPK Audit Report on the Financial Statements of the City / Regency of South Sulawesi Province for the 2022 fiscal year contained in the Semester Audit Results Overview, with sample selection using purposive sampling method. The independent variables in this study are the Internal Control System and Compliance with Laws and Regulations. The dependent variable in this study is the Local Government Audit Opinion. The data analysis technique in this study uses descriptive statistics and multiple regression to determine the effect of the internal control system and compliance with laws and regulations on local government audit opinion. The results showed that the internal control system and non-compliance with laws and regulations have a significant positive effect on the determination of audit opinion on local government financial statements issued by BPK.

Keywords: *Internal control system, compliance with laws and regulations, local government audit opinion*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Susanto SE., M.M., Ak., CPA, CPMA, CA, ACPA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Keluarga dan teman serta sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 13 Desember 2023

Yaskar M. Y Leluasa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1. Teori Keagenan	4
2.2. Opini Audit.....	4
2.3. Sistem Pengendalian Intern	5
2.4. Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan.....	5
2.5. Kerangka Konseptual	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	7
3.1. Objek Penelitian	7
3.2. Metode Penelitian.....	7
3.2.1 Statistik Deskriptif.....	7
3.2.2 Uji Normalitas.....	7
3.2.3 Uji Multikolonieritas.....	8
3.2.4 Analisis Regresi Berganda.....	8
3.2.5 Uji t	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Hasil.....	10
4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel	10
4.1.2 Uji Normalitas.....	11
4.1.3. Uji Multikolineritas.....	11
4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda	12
4.1.5. Uji Hipotesis	13
4.2 Pembahasan	14
4.2.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah.....	14

4.2.2. Pengaruh Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah.....	15
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	16
5.1. Simpulan.....	16
5.2. Saran.....	16
REFERENSI	17

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	10
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas	11
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas	11
Tabel 4. 4 Hasil analisis regresi linear berganda.....	12
Tabel 4. 5 Hasil Uji t.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang berlandaskan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksudkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan keuangan yang dilakukan Pemerintahan Daerah harus mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan tanggung jawab. Sehingga untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan.

Pemerintah daerah diharuskan menyusun laporan keuangan yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dan seiring perkembangannya diperbaharui menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. Selain mengacu pada SAP, untuk menyusun sistem akuntansi pada pemerintah daerah, kepala daerah juga merujuk pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005. Selain itu, kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah juga memiliki tugas menyusun kebijakan umum APBD yang merujuk pada pedoman penyusunan APBD yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diperbaharui setiap tahun.

Pengelolaan keuangan negara atau daerah telah banyak melakukan perubahan regulasi dari masa ke masa. Salah satu perubahan tersebut ialah upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Menurut Auditya (2013), pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila daerah tersebut mampu mengelola keuangan daerah sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 31 mengungkapkan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setiap tahun, BPK memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Pendapat audit dari BPK Republik Indonesia terdiri dari 4 opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Opini (TMP). Pada tahun 2022, sebanyak 2 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mendapatkan opini WDP dan yang mendapatkan opini WTP sebanyak 22.

Semakin wajar laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat opini laporan keuangan yang diterima. Jika tingkat kewajaran tinggi maka kemungkinan opini audit yang didapatkan pemerintah menjadi semakin baik. Dalam Paragraf Penjelasan Pasal 16 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK. Melalui pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa baik atau tidaknya suatu opini yang diberikan BPK dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya SPI di suatu pemerintah daerah dan apakah pemerintah daerah patuh atau tidak terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatannya.

Merujuk penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hubungan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan mendapatkan hasil yang inkonsistensi. Putri, Suarthana, & Edi (2021), Afwan & Nurwulan (2019), Hamidayanti & Wardani (2019) mendapatkan hasil bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian dari Safitri & Darsono (2014) dan Hartanto (2017) mendapatkan hasil bahwa kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Irman & Suryati (2017), Rosadi, Siyamto, & Aisyiah (2017), Putri et al., (2021), Afwan & Nurwulan (2019), Bangsawan & Abbas (2021) mendapatkan hasil bahwa ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Hamidayanti & Wardani (2019) dan Kusumawati & Ratmono (2017) menunjukkan hasil bahwa temuan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Peningkatan atau penurunan tingkat opini juga belum banyak mendapat perhatian khusus terutama dari segi pengembangan keilmuan terkait pengaruhnya dari kelemahan SPI maupun level kepatuhan peraturan perundang-undangan. Kawedar (2010) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa salah satu penyebab penurunan opini audit di Kabupaten PWJ adalah karena meningkatnya kasus terkait kelemahan SPI. Selanjutnya Sipahutar dan Khairani (2013) dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang menyebabkan perbedaan opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten EL yaitu karena adanya ketidaksesuaian tiga unsur pemeriksaan yaitu efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyajian laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan *research gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya yang ditunjukkan dengan adanya inkonsistensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya atas faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit pemerintah daerah, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang seberapa besar pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini audit yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pada pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh yang signifikan terhadap opini audit.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep efektivitas SPI dan level kepatuhan peraturan perundang-undangan dari sudut pandang kuantitatif sebagai pertimbangan dalam menentukan opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan bermanfaat dalam pengembangan kegiatan pemeriksaan di BPK Perwakilan Sulawesi Selatan khususnya mengenai masalah kelemahan SPI dan level entitas atas kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses perumusan opini pada laporan hasil pemeriksaan BPK sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan BPK.

REFERENSI

- Afwan, Fauzi Nur, & Nurwulan, Liza Laila. (2019). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidakpatuhan Tentang Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat)*. Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas.
- Arens, A.A., R.J. Elder, M.S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. 12 ed. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Auditya, Lucy., Husaini, dan Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness, Vol. 3 Nomor 1, 2013: 21-41.
- Bangsawan, Achdian Anggreny, & Abbas, Ahmad. (2021). *Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Ketidakpatuhan Peraturan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(2), 461–472.
- Ervina, Natalia, & Salim, Susanto. (2021). *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Tahun 2019-2020*. Jurnal Ekonomi: Special Issue, 37-58.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi ke-8*. Semarang ; Jakarta: Erlangga
- Hamidayanti, Luthfina, & Wardani, Marita Kusuma. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Seminar Nasional Dan The 6th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2019.
- Hidayatullah, A., Ari, W., & Julianto, W. (2020). *Analysis of Factors Affecting Audit Report Lag Manufacturing Company in Indonesia*. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 54(1), 85–109.
- , 2022 *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*
- Irman, Mimelientesa, & Suryati, Suryati. (2017). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Pada Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014*. Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis, 2(2), 197–209.
- Jensen, M. C., & Meckling, W.. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Human Relations, 72(10), 1671–1696.
- Kusumawati, Dwi Kusumawati, & Ratmono, Dwi. (2017). *Determinan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Diponegoro Journal Of Accounting, 6(1), 177–191.

- Larisa, Evani., & Salim, Susanto. (2021). *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Audit Report Lag Tahun 2019-2020*. Jurnal Ekonomi: Special Issue, 83-102.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Putri, Santi Ananda, Suarthana, Wayan Rai, & Edi, Sigit. (2021). *Pengaruh Temuan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Audit Kepatuhan Terhadap Opini Audit Bpk Pada Pemerintah Daerah Tahun Lk 2014-2015*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, 5(2).
- Rosadi, Samsul, Siyamto, Yudi, & Aisyiah, Helti Nur. (2017). *Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(02), 99–111.
- Safitri, Ni Luh Ketut Shanti Antik, & Darsono, Darsono. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Sipahutar, Hottua dan Siti Khairani. 2013. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. Terpublikasi di <http://eprints.mdp.ac.id>., diakses pada tanggal 8 Oktober 2016.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.